



---

**AUDIT DANA KAMPANYE: PERAN PENTING AUDITOR****Hezkia Juan Pratama**

UPN “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 Indonesia

Korespondensi penulis: [hezkiajuan@gmail.com](mailto:hezkiajuan@gmail.com)

**Abstract.** *Transparent political campaign funds are crucial for the existing democratic system in Indonesia. In certain cases, there is still the misuse of campaign funds that do not align with campaign needs and violate established regulations. Campaign fund reports are the primary material for campaign fund audits to ensure political party compliance. This research discusses the role of auditors in campaign fund audits, with a special emphasis on how auditors ensure that campaign financial reports are clean, honest, and accurate. Auditors are responsible for supervising and assessing the sources and uses of campaign funds to prevent fraud and violations of election laws. The research method used is descriptive qualitative, including document analysis and interviews with audit staff from an accounting firm in Sidoarjo. All the collected information is then analyzed and conclusions are drawn. The findings of this study indicate that the auditor's role is crucial in campaign fund audits. This includes not only the auditor's role but also the differences between general audits and campaign fund audits, emphasizing the verification of funding sources, ensuring that funds are used for campaign purposes, and ensuring proper use of funds. Auditors act as independent supervisors who ensure that all transactions are correctly recorded and reported, enhancing public trust in the election process. In campaign fund audits, auditors must be more careful in examining the relationship between funding sources and expenditures to identify potential violations and ensure that funds are used according to regulations.*

**Keywords:** *Auditor's Role; Campaign Funds; Compliance Audit*

**Abstrak.** Dana kampanye politik yang transparan sangat penting untuk sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Pada beberapa kasus tertentu masih terdapat penggunaan dana kampanye yang tidak sesuai kebutuhan kampanye dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Laporan dana kampanye adalah bahan utama dari audit dana kampanye untuk memastikan kepatuhan partai politik. Peran auditor dalam audit dana kampanye dibahas dalam penelitian ini, dengan penekanan khusus pada cara auditor memastikan laporan keuangan kampanye bersih, jujur, dan akurat. Auditor bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai sumber dan penggunaan dana kampanye untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran undang-undang pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, termasuk analisis dokumen dan wawancara dengan staf auditor dari salah satu KAP yang berada di Sidoarjo. Seluruh informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran auditor sangat penting dalam audit dana kampanye. Tidak hanya tentang peran auditor melainkan perbedaan audit umum dan audit dana kampanye, termasuk menekankan pada verifikasi sumber dana, memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan kampanye, dan memastikan bahwa dana digunakan dengan benar. Auditor bertindak sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa semua transaksi dicatat dan dilaporkan dengan benar, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dalam audit dana kampanye, auditor harus lebih hati-hati memeriksa hubungan antara sumber dana dan pengeluaran untuk menemukan kemungkinan pelanggaran dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peraturan.

**Kata Kunci:** *Audit Kepatuhan; Dana Kampanye; Peran Auditor*

**PENDAHULUAN**

Indonesia mengalami proses kemajuan bangsa yang ditandai dengan meningkatnya antusiasme masyarakat membangun negara yang memiliki sistem demokrasi. Demokrasi yang merupakan dasar hidup negara Indonesia berarti demokrasi menjadi tingkat paling akhir rakyat memberikan ketentuan pada masalah yang terjadi, juga menilai kebijakan negara yang berpengaruh dalam kehidupannya. (Basuki, 2020)

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang didirikan oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat; pemilihan umum adalah bukti demokrasi (Purnamawati, 2020). Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama demokrasi, yang membantu rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka secara adil. Di Indonesia, kejujuran dalam proses demokrasi menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa pemerintahan yang terpilih benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dua pilar utama kejujuran demokrasi adalah transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan dana kampanye adalah bagian penting dari penyelenggaraan pemilu. Dana kampanye sangat penting untuk setiap pemilihan umum karena memberi kandidat dan partai politik cara untuk menjalankan kegiatan kampanye mereka. Dana kampanye mencakup semua uang yang digunakan oleh kandidat dan partai politik selama kampanye dan harus dikelola dengan baik untuk menjamin proses pemilihan yang adil dan transparan.

Salah satu cara penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana adalah audit dana kampanye. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dana yang diterima dan dibelanjakan selama kampanye dilaporkan secara jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa audit yang efektif, kemungkinan penyimpangan, korupsi, dan praktik-praktik tidak etis lainnya akan meningkat. Pada akhirnya, ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan hasilnya.

Auditor bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan kampanye, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, dan membuat saran jika diperlukan. Sebagai pengawas independen, mereka membantu menjaga kerahasiaan sistem keuangan kampanye. Auditor harus mampu bekerja dengan profesionalisme dan ketelitian untuk menemukan dan mencegah pelanggaran dalam lingkungan yang rumit dan penuh tekanan seperti kampanye politik.

Akuntabilitas dana kampanye Parpol pada pemilu legislatif 2019 kepatuhan hanya dinilai dari penyerahan laporan dana kampanye sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU. Sepanjang parpol telah menyerahkan laporan dana kampanye, maka akan dianggap akuntabel (Henry Windrianto Darmoko, Hery Hermawan, & Fatchur Rochman, 2020). Akuntabilitas yang terjadi pada dana kampanye parpol tahun 2019 tidak mencerminkan akuntabilitas yang sesungguhnya. Peran auditor dalam menghasilkan laporan audit dana kampanye serta memastikan transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan agar tidak terjadi kejadian seperti hal serupa. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan membahas bagaimana peran auditor dalam menjaga kepatuhan partai politik dalam pengauditan laporan dana kampanye dilihat ketepatan waktu pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas laporan, kepatuhan partai politik dalam audit laporan dana kampanye.

## **KAJIAN TEORI**

Konsep Auditor, Audit Dana Kampanye, Dana Kampanye, Transparansi, dan Akuntabilitas

Auditor

Auditor punya peran yang penting pada hasil pemilu di Indonesia yang memiliki harapan auditor bisa memberikan semua yang baik dengan tetap bersikap profesional, auditor yang bebas dan tidak memihak kepada siapa pun (Ramadhan & Ikhwan Mansyuri, 2023). Auditor juga harus memiliki sikap independen dalam melakukan pemeriksaan maupun

memberikan penilaian. Independensi sangat penting dalam proses audit, dan hal ini juga tertuang dalam standar umum kedua: “Independensi harus dipelihara dalam pola pikir auditor dalam segala hal yang berkaitan dengan perikatan.” Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya auditor harus menjaga posisi independen dalam proses audit yang dilakukannya agar bersikap netral dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi atau ditekan oleh pihak lain dalam pengambilan keputusannya (Harahap & Pulungan, 2019).

#### Dana Kampanye

Dana kampanye merupakan serangkaian penerimaan dan pengeluaran dana oleh partai politik pada masa kampanye. Dana kampanye juga merupakan penunjang suksesnya calon legislatif pada saat kampanye. Semakin banyak dana yang dikeluarkan maka dapat menarik perhatian rakyat calon pemilih. Catatan keuangan politik yang terbuka dan transparan punya peran penting dalam memberantas korupsi dan memperbaiki kepercayaan publik. Transparansi memberi ruang panggung yang sama, tanggung jawab yang sama, larangan yang sama dan mengharuskan semua partai politik untuk patuh pada regulasi yang sama (Tosika & Fahmi, 2020).

#### Audit Dana Kampanye

Audit dana kampanye berperan penting sebagai alat yang mengontrol untuk memastikan terkendalinya dana kampanye sehingga hal tersebut dikelola secara efektif dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam mengaudit dana kampanye tidak sembarang orang boleh melakukannya tapi audit ini harus dilakukan oleh auditor yang berpengalaman, independen, dan kompeten agar hasil audit terhadap dana kampanye dapat dipercaya (Ramadhan & Ikhwan Mansyuri, 2023). Audit dana kampanye juga tidak sama dengan audit keuangan umum. Audit dana kampanye terfokus pada sumbangan, pengeluaran, batas sumbangan dana kampanye, dan ketepatan waktu.

#### Transparansi

Transparansi merupakan pemberian informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010). Transparansi sangat penting adanya, rakyat membutuhkan bukti dari kepercayaan yang telah diberikan. Tak hanya kepada pemerintah, transparansi juga berlaku untuk calon legislatif. Calon legislatif yang tidak bisa menerapkan transparansi dalam masa kampanye juga tidak bisa diberikan tanggung jawab untuk menduduki posisi dalam pemerintahan.

#### Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh semua organisasi, swasta atau publik. Perkembangan sektor publik menunjukkan adanya peningkatan tuntutan terhadap akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti yayasan.

Tuntutan ini berkaitan dengan kebutuhan akan transparansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat untuk memenuhi hak-hak mereka (Yanuarisa, 2020).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian artikel ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif dimana peneliti menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dan dokumentasi, pendekatan penelitian kepustakaan, jurnal dan hukum dengan mempertimbangkan topik-topik yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Sumber informan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang auditor di salah satu KAP di Sidoarjo.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian dilaksanakan pada 03 Juli 2024. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan penelitian. Hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Ditemukan perbedaan terkait dengan audit dana kampanye dengan audit keuangan umum. Audit dana kampanye yang tergolong audit kepatuhan memiliki cara tersendiri dalam proses auditnya. Peraturan laporan dan audit dana kampanye ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di audit general kita mengaudit akun seperti akun kas, piutang dan kawan-kawan itu pun ada jenis labanya, berapa jumlah pendapatan, beban pokok, dan beban yang lain. Audit dana kampanye hanya penerimaan dana kampanye dan dikeluarkan sebagai alat peraga kampanye.

(Hasil wawancara dengan AD tanggal 03 Juli 2024)

Tujuan dari audit dana kampanye sendiri adalah untuk memastikan kepatuhan laporan dana kampanye terhadap undang-undang yang berlaku dan auditor memainkan peran penting dalam proses tersebut. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan wawancara salah satu auditor sebagai berikut:

Peran auditor menilai atas kepatuhan laporan dana kampanye sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menilai apakah partai dan calon legislatif layak atau tidak

(Hasil wawancara dengan AD tanggal 03 Juli 2024)

Auditor berperan sebagai pemeriksa kepatuhan laporan dana kampanye yang nantinya sebagai bukti kelayakan dari seorang calon pemimpin maupun calon legislatif.

Audit dana kampanye merupakan prosedur yang harus dilakukan ketika terdapat kegiatan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Auditor perlu mempelajari peraturan dan tata cara audit dana kampanye. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan dana kampanye terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dasar peraturan dalam audit dana kampanye tahun 2024 adalah "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 210 TAHUN 2024"(KPU, 2024). Hal tersebut memiliki kesamaan dengan wawancara salah satu auditor sebagai berikut:

Auditor harus patuh pada peraturan yang berlaku, kalau dana kampanye kan pasti undang-undang kalau laporan keuangan komersial kan PSAK, SAK, dan sebagainya; Auditor bertanggungjawab kepada KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan khususnya kepada penyumbang.

(Hasil wawancara dengan HP tanggal 03 Juli 2024)

Auditor dituntut untuk memahami dan menaati peraturan dan prosedur audit dana kampanye, ketika prosedur tersebut dilakukan dengan benar maka auditor dapat memberikan hasil audit yang memenuhi sifat transparansi dan akuntabilitas.

## KESIMPULAN

Auditor memiliki peran penting dalam menilai kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas laporan dana kampanye serta kelayakan calon legislatif. Audit yang independen dan berkualitas tinggi dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Tujuan dari mengaudit laporan dana kampanye adalah untuk menguji prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga calon dapat bertanggungjawab atas pengeluaran maupun pemasukan dana kampanye. Dasar peraturan audit dana kampanye telah ditetapkan oleh KPU. Terdapat perbedaan audit umum dengan audit dana kampanye, selain terkait peraturan akun, data, dan model laporan juga berbeda. Dokumen atau bukti-bukti laporan dana kampanye, seperti kuitansi, bukti transfer, dan lainnya dapat digunakan seorang auditor untuk melakukan analisis sekaligus pemeriksaan material guna mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana kampanye. Dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk analisis auditor mencakup Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye, Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Pada dokumen-dokumen tersebut auditor mendapatkan temuan-temuan apabila terdapat kesalahan/perbedaan di dalam laporan untuk ditindaklanjuti agar bisa membuat opini terkait laporan tersebut patuh atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. Retrieved from <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Harahap, R. U., & Pulungan, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Salah Saji Material pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 2623–2650. Retrieved from <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.4752>
- Henry Windrianto Darmoko, Hery Hermawan, & Fatchur Rochman. (2020). Mengungkap makna akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye parpol: bukti daripemilu legislatif 2019 Indonesia. *JAMER*, Volume 3 Nomor 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71*.
- Purnamawati, E. (2020). PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/1>
- Ramadhan, R., & Ikhwan Mansyuri, M. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dana Kampanye Partai Politik*.
- Tosika, M., & Fahmi, K. (2020). Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik INTEGRASI LAPORAN KEUANGAN DAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, V. Retrieved from <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya, 12.